



**KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KEP.01/MEN/2008**

**TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
ORGANISASI PENGELOLAAN PERIKANAN REGIONAL
(*REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT ORGANIZATIONS/RFMOs*)**

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran aktif Indonesia pada *Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional*, antara lain Komisi Tuna Samudera Hindia (*Indian Ocean Tuna Commission/IOTC*), Komisi tentang Konservasi Tuna Sirip Biru (*Commission on The Conservation of Southern Bluefin Tuna/CCSBT*), Komisi Perikanan untuk Pasifik Barat dan Tengah (*Western and Central Pacific Fisheries Commission/WCPFC*), maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organizations/RFMOs*);
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The Law of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia;

7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement for the Establishment of the Indian Ocean Tuna Commission* (Persetujuan mengenai Pembentukan Komisi Tuna Samudera Hindia);
10. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2007
12. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.17/MEN/2006 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

- Memperhatikan:
1. *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982;*
 2. *Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on The Law of The Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks.*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA ORGANISASI PENGELOLAAN PERIKANAN REGIONAL (REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT ORGANIZATIONS/ RFMOs).**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional (*Regional Fisheries Management Organizations/RFMOs*) yang selanjutnya disebut Pokja Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional terdiri dari Penasehat, Pengarah dan Pelaksana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pokja Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas:

A. PENASEHAT :

memberikan bimbingan terhadap Pokja Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional dalam partisipasi aktif Pemerintah dalam Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional serta hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan partisipasi aktif tersebut.

B. PENGARAH:

memberikan arahan kepada Pokja Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

C. PELAKSANA:

1. menyiapkan rencana pembahasan Kelompok Kerja Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional;
2. melaporkan pelaksanaan pembahasan Kelompok Kerja Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional kepada Menteri Kelautan dan Perikanan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3. **Sub Pokja Keilmuan (*Scientific Committee*):**
 - a) melaksanakan riset perikanan di area konvensi RFMOs tentang aspek biologi, pemanfaatan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi;
 - b) melakukan sintesa hasil-hasil riset perikanan Indonesia yang dilaksanakan di area konvensi RFMOs;
 - c) menghadiri pertemuan ilmiah RFMOs mewakili pemerintah Indonesia;
 - d) memberikan rekomendasi dan informasi ilmiah kepada Sub Pokja Administrasi dan Keuangan (*Administration and Finance*) serta Sub Pokja Ketaatan/kepatuhan (*Compliance Committee*);

- e) melakukan diseminasi hasil pertemuan ilmiah RFMOs kepada Stakeholder perikanan di tingkat nasional maupun daerah;
- f) melakukan koordinasi dengan masing-masing Sub Pokja, unit kerja dan instansi terkait.

4. Sub Pokja Ketaatan/Kepatuhan (*Compliance Committee*):

- a) Melakukan kajian berkenaan dengan aspek ketaatan/kepatuhan (*Compliance Committee*);
- b) melakukan diseminasi dan sosialisasi hasil-hasil konferensi Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional;
- c) menyusun rencana monitoring dan evaluasi setiap Sub Pokja;
- d) melakukan koordinasi dengan masing-masing Sub Pokja, unit kerja dan instansi terkait.

5. Sub Pokja Administrasi dan Keuangan (*Administration And Finance Committee*):

- a) mempersiapkan posisi Delegasi Republik Indonesia (DELRI) dalam Konferensi-konferensi yang diadakan oleh Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional;
- b) mempersiapkan rencana tahunan kegiatan Kelompok Kerja Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional;
- c) melakukan koordinasi dengan masing-masing Sub Pokja, unit kerja dan instansi terkait.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Pokja Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional bertanggungjawab dan menyampaikan laporan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Pokja Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional dapat mengundang dan mengikutsertakan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) guna mendapatkan hasil yang lebih optimal.

KELIMA : Masa Kerja Pokja Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA berlaku mulai sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan bulan Desember 2008.

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran Departemen Kelautan dan Perikanan Tahun 2008

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Januari 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.

Ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



SUPRANAWA YUSUF

LAMPIRAN : Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan R.I.
 Nomor KEP.01/MEN/2008
 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja
 Organisasi Pengelolaan Perikanan Regional
 (*Regional Fisheries Management Organizations/*
RFMOs).

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
 KELOMPOK KERJA ORGANISASI PENGELOLAAN PERIKANAN REGIONAL
 (REGIONAL FISHERIES MANAGEMENT ORGANIZATIONS/RFMOs)**

A. PENASEHAT

Menteri Kelautan dan Perikanan

B. PENGARAH

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Ir. Widi Agoes Pratikto, M.Sc. Ph.D	Sekretaris Jenderal
2.	Dr. Ir. Ali Supardan, M.Sc	Dirjen Perikanan Tangkap
3.	Prof. Dr. Dwi Suryo Indroyono, M.Sc	Ka. Badan Riset Kelautan dan Perikanan
4.	Dr. Ir. Aji Sularso, MMA	Dirjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
5.	Prof. Dr. Martani Huseini	Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
6.	Prof. Dr. Hasyim Djalal	Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan
7.	Dr.Ir. Suseno Sukoyono, MM	Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi, Sosial dan Budaya

C. PELAKSANA

1. Sub Kelompok Kerja Keilmuan (*Scientific Committee*)

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Dr.Ir. Victor PH Nikijuluw	Kapus Pusat Riset Perikanan Tangkap	Ketua
2.	Drs. Budi Iskandar Prisantoso, M.Sc	Kabid. Monev Pusat Riset Perikanan Tangkap	Sekretaris
3.	Dr. Ir. Purwito Mangkusubroto	Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
4.	Prof. Dr. Daniel Monintja	Guru Besar Institut Pertanian Bogor	Anggota
5.	Prof. Dr. John Haluan	Guru Besar Institut Pertanian Bogor	Anggota
6.	Dr. Chandra Nainggolan	Dosen Sekolah Tinggi Perikanan	Anggota
7.	Ir. Duto Nugroho, M.Si	Ka. Balai Riset Perikanan Laut, Pusat Riset Perikanan Tangkap	Anggota
8.	Ir. Sri Dyah Retnowati, SP	Kasubdit. Data dan Statistik Perikanan Tangkap, Dit. SDI, Ditjen Perikanan Tangkap	Anggota
9.	Satya Pratama, M.Sc	Kasubbid Regional, Puskita, Setjen	Anggota

2. Sub Kelompok Kerja Ketaatan/Kepatuhan (*Compliance Committee*)

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Ir. R. Nilanto Perbowo, MSc	Dir. Sumberdaya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap	Ketua
2.	Ir. Endroyono, S.E, M.M	Kasubdit Pemanfaatan Sumber Daya Ikan ZEEI & laut Lepas, Ditjen Perikanan Tangkap	Sekretaris
3.	Ir. Yunus Lebang Lambe	Dir. Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
4.	Happy Simanjuntak, SH	Dir. Pengawasan Sumber Daya Perikanan, Ditjen Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Anggota
5.	Dr. Anang Nugroho, SM, SCm, MEM	Dir. Pemasaran Luar Negeri, Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Anggota
6.	Dr. Wudianto	Peneliti Pusat Riset Perikanan Tangkap	Anggota
7.	Hanung Cahyono, SH. L.LM	Kabag. Hukum, Org. dan Humas, Ditjen Perikanan Tangkap	Anggota

3. Sub Kelompok Kerja Administrasi dan Keuangan (*Administration and Finance Committee*)

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1.	Dr. Sunggul Sinaga	Kapus. Analisis Kerjasama Internasional dan Antarlembaga, Setjen	Ketua
2.	Ir. Suhendro Budihardjo	Kabid. Kerjasama Antar Lembaga, PusKita, Setjen	Sekretaris
3.	Supranawa Yusuf, SH, MPA	Karo Hukum dan Organisasi, Setjen	Anggota
4.	Dr. R. Akhmad Budiono	Karo Keuangan, Setjen	Anggota
5.	Ir. Saut P. Hutagalung, M.Sc	Kapus Data, Statistik dan Informasi, Setjen	Anggota
6.	Ir. Rachmat Lubis	Kabag. Program, Ditjen Perikanan Tangkap	Anggota

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
7.	Fachtarul Amin, SH	Kasubbag. Hukum dan Perjanjian, PusKita, Setjen	Anggota
8.	Dra. Widyastuti	Kasubbid. Antarlembaga, PusKita, Setjen	Anggota

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.

Ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi



SUPRANAWA YUSUF